

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi menjelaskan hubungan sebuah antara prinsipal sebagai pihak yang pertama dan agen sebagai pihak kedua yang terikat atas kontrak perjanjain. Menurut Mathius (2016) teori agensi merupakan implemenstasi dalam suatu organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya kewajiban pihak pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan, menyediakan, melaporkan dan menjabarkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk memperoleh pelayanan dan peningkatan pembangunan.

Perbedaan kepentingan terkadang menjadi sebuah pro dan kontra karena salah satu pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moe (1984) dalam Dwiyardari (2018) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan, di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan - kesepakatan *principal-agent* yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan.

Hubungan teori agensi dalam penelitian ini melihat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana yang disediakan untuk pembangunan daerah sendiri. Masyarakat mengawasi kinerja pemerintah dan berhak mendapatkan imbalan dan pelayanan dari pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah (Ningsih & Sari, 2018). Pemerintah daerah dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah.

Pemerintah pusat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, konsekuensi dari pendelegasian wewenang, pemerintah pusat telah menyalurkan dana perimbangan, yang tujuannya adalah guna membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan tata kelola sehari-hari. Masyarakat sebagai prinsipal menyediakan sumber daya bagi daerah dengan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain untuk meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri (Halmawati, 2019).

2. Teori Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Menurut Nur Azizah (2017) pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah berdasarkan kepentingan dan kebutuhan daerah oleh pemerintah pusat ditujukan daerah serta pemberian wewenang pengalokasian dana dalam bidang keuangan antar level pemerintahan merupakan desentralisasi fiskal. Dasar desentralisasi fiskal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi, pengalokasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah lebih

sesuai dan bermanfaat bagi pemerintah daerah dan menguatkan kondisi kebutuhan daerah sendiri. Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera. Teori Federalisme Fiskal merupakan teori yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui kinerja pemerintah agar desentralisasi fisa berjalan sesuai kondisi ekonomi. (Fretes, 2017).

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang seperti melihat pada pendapatan perkapita suatu negara dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia merupakan proses atau kegiatan pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus utama, dan bukan hanya sebagai sasaran akhir, dari seluruh kegiatan tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), serta meningkatkan

pendidikan (keterampilan baca tulis) untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi.

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah yang dianggarkan untuk perolehan setiap tahun mengalami peningkatan, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pendapatan asli daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal.

Tidak terkecuali untuk belanja modal fungsi pendidikan. Pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan adalah bagian anggaran dari pemerintah daerah yang dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan bijaksana untuk suatu periode pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi/belanja pemerintah dalam investasi pembangunan pada sektor pendidikan (Asri, 2013).

6. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kabupaten/kota (Harahap, 2011), serta untuk membiayai

kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN (Sarkoro dan Zulfikar, 2016).

Menurut Undang – Undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dimaksud kebutuhan khusus disini adalah pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. DAK sangat penting bagi pembangunan pendidikan karena dengan adanya DAK pendidikan akan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap semua pengeluaran pemerintah. DAK untuk belanja modal fungsi pendidikan sangat memengaruhi naiknya anggaran belanja modal fungsi pendidikan di daerah.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Sembiring, 2017). Menurut Sutrisna dan Dewi (2014) tingginya tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat meningkatkan kegiatan dan kemakmuran masyarakat serta mendukung

pertumbuhan ekonomi. kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks pembangunan manusia tercapai bahwa meningkatkan produktivitas mendukung pertumbuhan ekonomi. Proses peningkatan total output secara terus menerus dalam jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi. Penjelasan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah terlepas dari kenaikan yang lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak menurut Sukirno (1981). Pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan perekonomian di suatu daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diasumsikan masyarakat yang ada di daerah tersebut semakin sejahtera. Tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan kesejahteraan. Hal tersebut karena setiap wilayah memiliki keunggulan di masing-masing sektor yang merupakan sumber pendapatan wilayah itu. Pemerataan di bidang ekonomi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik (Arsyad, 2014).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	Penulis	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Sembiring, 2019	X1: Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh positif terhadap IPM 2. DAU berpengaruh negatif terhadap IPM 3. DAK negatif berpengaruh terhadap IPM
		X2: Dana alokasi umum (DAU)	
		X3: Dana alokasi khusus (DAK)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
2	Jember & Adelfina, 2016	X1: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
3	G.A Byckov & RA Yakunina, 2015	<i>Correlation Analysis Of The Components Of The Human Development Index Across Countries</i>	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM
4	Budiasih & Wiliantara, 2019	X1 : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD tidak berpengaruh terhadap IPM 2. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM 3. DAK berpengaruh negatif terhadap IPM
		X2: Dana alokasi umum (DAU)	
		X3: Dana alokasi khusus (DAK)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
5	Utomo & Ramadhani, 2019	X: Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
6	Darsana & Wijayati, 2015	X1 : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD tidak berpengaruh terhadap IPM 2. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM
		X2: Dana alokasi umum (DAU)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
7	Subambang & Rinanda, 2020	X1: Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh positif positif dan signifikan terhadap IPM 2. DAU tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM 3. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM
		X2: Dana alokasi umum (DAU)	
		X3: Dana alokasi khusus (DAK)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	

Lanjutan tabel 2.1

No	Penulis	Variabel yang digunakan	Hasil
8	Nurdiawnsyah & Pratiwi, 2019	X1 : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
9	Ulupui & Putra, 2015	X1 : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh terhadap IPM
		X2: Dana alokasi umum (DAU)	2. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM
		X3: Dana alokasi khusus (DAK)	3. DAK berpengaruh terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
10	Prihastuti, 2015	X1 :Pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
12	Sutrisna & Dewi, 2014	X1 : Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
13	Somaji dkk, 2014	X1 : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
14	Badera & Yasintha, 2018	X1 : Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
15	Syofya	X1 : Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
16	Fretes, 2017	X1: Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh positif terhadap IPM
		X2: Dana alokasi umum (DAU)	2. DAU berpengaruh negatif terhadap IPM
		X3: Dana alokasi khusus (DAK)	3. DAK berpengaruh negatif terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
17	Amalia dkk, 2019	X : Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	

Lanjutan tabel 2.1

No	Penulis	Variabel yang digunakan	Hasil
18	Rukmana & Juliana, 2020	X : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh terhadap IPM
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
19	Agung & Hasan, 2018	X1 : Dana alokasi umum (DAU)	1. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM 2. DAK tidak memiliki hubungan terhadap IPM
		X2: Dana alokasi khusus (DAK)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
20	Pertiwi & Rahmayati, 2018	X1 : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh terhadap IPM 2. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM 3. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM
		X2 : Dana alokasi umum (DAU)	
		X3: Dana alokasi khusus (DAK)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
21	Zulfikar & Sarkoro, 2016	X1 : Dana alokasi umum (DAU)	1. DAU tidak berpengaruh terhadap IPM 2. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM 3. PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM
		X2 : Dana alokasi khusus (DAK)	
		X3 : Pendapatan asli daerah (PAD)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	
22	Rani dkk, 2018	X1 : Pendapatan asli daerah (PAD)	1. PAD berpengaruh positif terhadap IPM 2. DAU berpengaruh positif terhadap IPM 3. DAK berpengaruh positif terhadap IPM
		X2 : Dana alokasi umum (DAU)	
		X3 :Dana alokasi khusus (DAK)	
		Y: Indeks pembangunan manusia (IPM)	

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dana alokasi khusus, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi, terhadap variabel dependen indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015-2019. Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada akhirnya ditentukan oleh banyak faktor terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Prihastuti,2018)

Pembangunan manusia yang di negara Indonesia merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi dan mendorong sistem pembangunan suatu negara maupun daerah (Jember&Adelfina, 2016). Sembiring (2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi penerimaan aset daerah yang didukung maka semakin mandiri daerah tersebut jika dilihat dari sisi keuangannya.

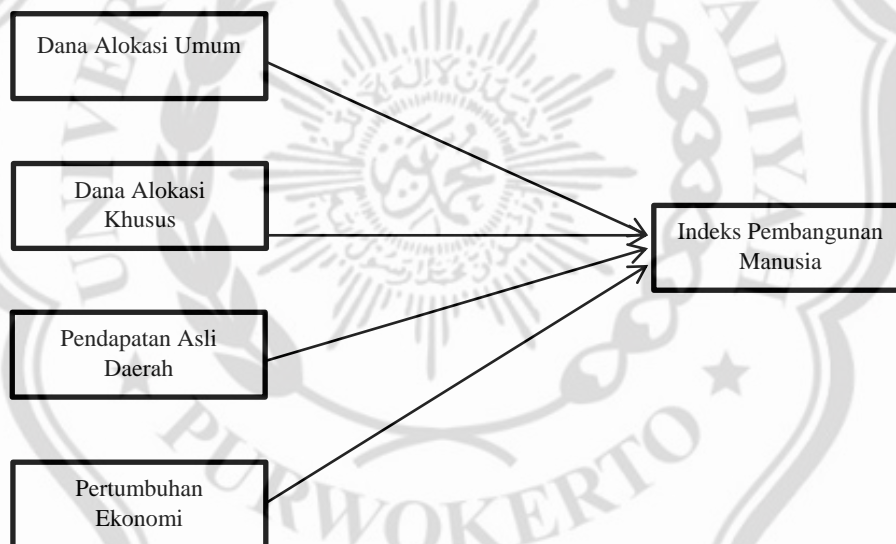
Budiasih & Wiliantara (2016) menjelaskan bahwa suatu daerah dalam rangka mengurangi adanya kesenjangan fiskal salah satunya dengan cara pengalokasian dana yang sesuai dan bersumber dari APBN guna membiayai keperluan daerah serta menunjang pembangunan daerah. Penggunaan DAU dan DAK diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ulupui & Putra (2015) menjelaskan Tingkat pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pembangunan yang merata. Pemerataan yang dilaksanakan akan terciptanya pembangunan manusia yang berkualitas dan

memperoleh hasil yang diharapkan. Kresna & Ayu (2014) menjelaskan dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi maka dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi supaya lebih meningkat serta mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di era otonomi daerah. Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut

Kerangka Pemikiran :

Gambar 2.1



2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

Sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah yang wajib dibayarkan oleh masyarakat daerah yang sesuai dengan undang-undang. Hasil dari pembayaran masyarakat digunakan untuk melaksanakan program pemerintah meningkatkan infrastruktur dan

sarana dibidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. (Halmawati dkk, 2019). Dalam teori agensi dijelaskan dalam hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat menyediakan sumber daya untuk daerah dengan melakukan pembayaran pajak, retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah yang berperan sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen yang mengelola layanan publik guna masyarakat dapat merasakan manfaatnya (Rizna dkk, 2019).

Besaran PAD dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk mendanai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam rangka desentralisasi pendapatan asli daerah sangat berkontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat (Budiasih dan Wiliantara,2016). Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana alokasi umum adalah sumber APBN untuk mendanai kebutuhan daerah yang bertujuan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004). pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola serta mengalokasikan pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan, perbaikan, pelayanan kepada masyarakat (Adiputra, dkk, 2015).

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di setiap daerah. DAU diharapkan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut (Pertiwi,2018). Pengelolaan DAU memperhatikan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme pengelolaan yang tepat dan transparan (Subambang dan Rinanda,2019). Dalam penelitian Budiasih (2016) DAU seharusnya digunakan untuk membiayai belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tuntutan dari desentralisasi. Maka pengealokasian DAU yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap nilai IPM.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dana alokasi khusus merupakan Sumber dari dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan terhadap daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dengan skala nasional. Penggunaan dana alokasi khusus pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena dana lokasi khusus merupakan bagian dari APBD. Meningkatnya dana alokasi khusus diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia (Ulupui & Putra, 2015).

Dana Alokasi Khusus (DAK) ini digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik (Subambang dan Rinanda,2020)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Jika dilihat DAK,

pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan sosial, maupun pelayanan umum (Pertiwi, 2018).

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (Kalsum, 2017). Pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan perekonomian di suatu daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diasumsikan masyarakat yang ada di daerah tersebut semakin sejahtera. Tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan kesejahteraan (Tahawa dkk, 2019)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan penduduk yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesehatan dan keharmonisan masyarakat yang

berkelanjutan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Putu dan Ketut, 2014). Menurut Prihastuti (2018) untuk meningkatkan kualitas hidup manusia harus menyiapkan sumber daya yang unggul melalui pendidikan sebagai salah satu syarat dalam membangun negara guna memiliki kompeten yang mampu bersaing di internasional. Pemerintah tetap harus mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga harus lebih fokus melakukan pembangunan yang berpihak di bidang manusia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang didukung oleh Jember dan Adelfina (2016) Maka hipotesis yang dapat ditarik dari uraian tersebut adalah :

H4 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia